SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

Uswatun hasanah
Universitas Hamzanwadi Lombok Timur
Email: uswatun.hasanah197@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penarikan barang kredit di FIFGroup Cabang Metro yang di tinjau dari etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu dimulai dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan tentang perspektif etika bisnis islam pada strategi bersaing yang diterapkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system penarikan yang ada di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis islam dimana tidak ada kejujuran dan rasa bertanggung jawab untuk saling bertoleransi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan, dan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam tentang pertanggungjawabannya itu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi.

Kata Kunci: Penarikan, Kredit, Etika Bisnis Islam

Abstract

The purpose of this study was to find out how the credit withdrawal system at FIFGroup Metro Branch was reviewed from Islamic business ethics. This research is a type of field research and is descriptive qualitative. This study used interview data collection techniques and then analyzed using qualitative inductive analysis methods, which started by using data obtained from the field about the perspective of Islamic business ethics on the applied competitive strategy, then analyzed using the principles of Islamic business ethics. The results of this study indicate that the withdrawal system in FIFGROUP is not in accordance with Islamic business theory and ethics where there is no honesty and sense of responsibility for mutual tolerance. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/OMK.10/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for Financing Companies Conducting Consumer Financing for Motorized Vehicles with Fiduciary Guarantees. Article 3, Financing Companies are prohibited from withdrawing fiduciary collateral objects in the form of motorized vehicles if the Fiduciary Registration Office has not issued a fiduciary guarantee certificate and submitted it to the Financing Company, and has not applied the principles of Islamic business ethics regarding its accountability that functions human nature.

Keywords: Withdrawal, Credit, Islamic Business Ethics

PENDAHULUAN

Kegiatan anusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. (Ahmad Wardi Muslich, 2017)

Tingkat kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk transaksi jual beli menggunakan cara kredit. Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Jenis jual beli kredit yang lazim dilakukan masyarakat dewasa ini adalah seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan, Kredit alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004)

Hukum jual beli dengan sistem kredit memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, amun jumhur ulama membolehkannya. Diperbolehkannya jual beli dengan sistem

kredit karena mengandung hikmah. Salah satu hikmah jual beli kredit adalah adanya unsur saling tolong menolong dan saling bantu. Penjual membantu pembeli dengan cara memberikan kelonggaran pembayaran dengan cara mengangsur. Sementara pembeli membantu penjual dengan memberikan laba yang lebih dari harga pembelian secara *cash* (Imam Mustofa, 2017) Permasalahan yang biasanya timbul dari jual beli kredit yaitu konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran. Sikap konsumtif masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, menjadi faktor pendorong yang mengakibatkan konsumen yang telah melakukan proses kredit tidak sanggup membayar cicilan kendaraan bermotor setiap bulannya (Jusnizar Sinaga, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Ketika pembeli telah melakukan

pelanggaran penunggakan cicilan, adanya kegiatan penarikan barang (obyek) secara paksa oleh pihak penjual. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah Hakim. Oleh sebab itu, untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli secara paksa, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Badan usaha yang sering mempraktikkan jual beli kredit adalah dealer. Dealer biasa digunakan untuk menyebut sebuah toko mobil atau motor. Jual beli kredit di dealer biasanya dilakukan melalui *leasing*. Leasing adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita, 2013).

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan di FIFGroup dengan Ibu Dian, selaku Sales Marketing FIFGroup Cabang Metro, didapatkan informasi bahwa FIFGroup

melayani jual beli kredit dengan bekerjasama dengan dealer-dealer di Kota Metro, salah satunya adalah Dealer Honda Bhinneka Motor. FIFGroup mempunyai beberapa produk yaitu diantaranya SPEKTRA, AMITRA, DANASTRA dan FIFASTRA. Pelayanan kredit kendaraan di FIFGroup termasuk dalam salah satu produknya yaitu FIFASTRA yang melayani kredit motor khusus untuk kredit motor baru. Untuk dapat menerima fasilitas kredit, pihak FIFGroup memberlakukan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Pada perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan apabila debitur melakukan pelanggaran maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan. (Ibu Dian, Sales Marketing FIFGroup Metro, 2018)

Mengenai permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Faktor yang menyebabkan penarikan barang kredit yaitu adanya konsumen yang tidak sanggup membayar cicilan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan

tersebut. Dalam prosedurnya pihak FIFGroup memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut.

Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen. Pada tahap ini proses yang dilakukan pihak FIFGroup biasanya dimulai dengan jatuh tempo pertama yaitu dengan menghubungi konsumen untuk membayar, 3 hari dari jatuh tempo masih akan terus di hubungi, 1 bulan dari jatuh tempo akan dilakukan pengunjungan ke rumah konsumen, 2 bulan jatuh tempo maka akan dilakukan tindakan dengan penarikan barang kredit tersebut.

Pada tahan penarikan barang pihak FIFGroup biasanya menugaskan *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada konsumen berdasarkan berapa lamanya tunggakan konsumen. Apabila sudah lewat tenggang waktu, maka dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit tersebut. ((Ibu Dian, Sales Marketing FIFGroup Metro, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham, selaku salah satu konsumen di Dealer Motor dengan sistem kredit yang dilakukan melalui FIFGroup, didapatkan

informasi bahwa praktek pelaksanaan penyitaan barang melalui jasa *debt collector* kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap konsumen yang menunggak angsuran. (Bapak Ilham, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem penarikan barang kredit yang dilakukan FIFGroup adalah dengan penarikan paksa. Penarikan paksa dilakukan karena pihak FIFGroup sudah memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi cicilan bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayar. Dikarenakan sudah lewat tenggat waktu maka dilakukan penarikan paksa tersebut. Penarikan paksa ini dilakukan melalui jasa *debt collector*. Penggunaan jasa *debt collector* ini kerap dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap konsumen yang membandel.

Penarikan kendaraan oleh pihak *leasing* apabila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian yang sudah di tentukan. Menurut Endang Purwaningsih, “apabila konsumen lalai untuk melakukan kewajibannya membayar cicilan maka pihak *leasing* berhak untuk menagih semua pembayaran yang masih terutang dan menerima kembali barangnya”. (Endang Purwaningsih, 2015).

Menurut etika bisnis Islam, bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara

berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar orang utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan. Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai *shadaqah*. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. (Hendi Suhendi, 2010)

Selain itu, salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*). Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.⁽ Muhammad Djakfar, 2007)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu kualitatif. yaitu “suatu penelitian yang

dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”. (Abdurrahmat Fathoni, 2011)

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Sistem Penarikan Barang Kredit FIFGroup.

Sistem penarikan barang kredit FIFGROUP adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang sering dilakukan oleh konsumen yang menunggak pembayaran kredit atau tidak membayar cicilan kredit. Pada sistem penarikan kredit ada faktor yang menyebabkan penarikan barang kredit yang dilakukan oleh FIFGROUP kepada konsumen. Permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Faktor utama yang menyebabkan penarikan barang kredit yaitu adanya konsumen yang tidak sanggup membayar cicilan dengan

berbagai alasan yaitu ada yang menunggu gaji bulanan, bagi pedagang kalau dagangan mereka lagi sepi, atau ada juga yang pekerjaannya lagi sepi contohnya seperti kuli bangunan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut.

Perusahaan FIFGroup dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen.

Berdasarkan penuturan Ibu Putri selaku counter sales bahwa sistem kredit yang ada di FIFGROUP Cabang Metro memiliki dua sistem yaitu yang pertama dengan konsumen bisa datang ke dealer motor yang bekerja sama dengan pihak FIFGROUP biasanya di dealer motor tersebut akan langsung ditawarkan jasa untuk kredit. Jasa kredit yang ditawarkan yaitu membayar angsuran 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Adapun jaminan yang diberikan yaitu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). BPKB akan diserahkan kepada konsumen jika konsumen sudah melunasi semua angsuran kredit. dan yang kedua konsumen dapat langsung datang ke FIFGROUP Cabang Metro. Konsumen dapat

menentukan sendiri *Down Payment* (DP) lamanya waktu kredit yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan, dan jumlah angsuran yang akan langsung datang ke FIFGROUP Cabang Metro. Konsumen dapat menentukan sendiri *Down Payment* (DP) lamanya waktu kredit yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan, dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan.

Perusahaan FIFGroup dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen. (Wawancara dengan Ibu Putri Selaku Sales Counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018)

Sistem penarikan barang kredit FIFGROUP Cabang Metro biasanya dimulai dengan jatuh tempo pertama yaitu dengan menghubungi konsumen untuk membayar, 3 hari dari jatuh tempo masih akan terus di hubungi, 1 bulan dari jatuh tempo akan dilakukan pengunjungan ke rumah konsumen, 2 bulan jatuh tempo maka akan dilakukan tindakan dengan penarikan barang kredit tersebut. Pada tahan penarikan barang pihak

FIFGroup biasanya menugaskan *Kolektor* atau biasa orang menyebutnya *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada konsumen berdasarkan berapa lamanya tunggakan konsumen. Apabila sudah lewat tenggang waktu, maka paksa pada unit kendaraan kredit tersebut. Adapun pihak yang terlibat dalam penarikan barang kredit yaitu *Kolektor* dan UH (*Unit Head*).⁹¹

Adapun pihak yang terlibat dalam penarikan barang kredit yaitu *Kolektor* dan UH (*Unit Head*). (Wawancara dengan Ibu Putri Selaku Sales Counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018).

Perusahaan FIFGROUP menerapkan sistem penarikan barang kredit yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun pada prakteknya pihak FIFGROUP hanya memberlakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu) yaitu hanya dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan. Pihak FIFGROUP tidak menerapkan sistem *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit) yang akan memberatkan bagi konsumen yang tidak bisa membayar angsuran cicilan. Pada prakteknya FIFGROUP tidak sesuai dengan ketentuan sistem penarikan kredit.

Perjanjian kredit, kewajiban pembayaran tidak bisa gugur dengan kematian

atau kepailitan debitur. Debitur menjadi pihak yang paling berhak untuk melunasi hutang-hutangnya daripada orang lain yang mempunyai hutang yang bukan karena kredit. Debitur juga berhak untuk menentukan apakah perjanjian kredit tetap dilanjutkan atau dihentikan. Kreditur diperbolehkan mengambil barangnya kembali dengan syarat ia tidak mengambil uang angsuran atau uang muka dari debitur. (Imam Mustofa. 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Analisa hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan temuan hasil penelitian dan dalil-dalil yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem penarikan yang ada di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis islam dimana tidak ada kejujuran dan rasa bertanggung jawab untuk saling bertoleransi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya

kepada Perusahaan Pembiayaan, dan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam tentang pertanggung jawaban yaitu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, dan prinsip keadilan dimana dalam kegiatan kredit tersebut terdapat pihak yang dirugikan karena tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Agus Arijanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: iswah, 2004
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita. “Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai. Kredit dan Leasing”. dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Bogor: STIE Kesatuan Bogor. Vol. 1 No. 1, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Eduard Lumbantobing, “Penyelesaian Kredit Pembelian Sepeda Motor Bermasalah (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Medan)”.
- Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Teori. Kasus. dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. Bandung, 2014.
- Jusnizar Sinaga. dkk. “Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana”, dalam *USU Law Journal*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. Vol.5.No.2. April 2017.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Malayu. S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002. Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Pers, 2007.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis. dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Toga Adi Putra Sinaga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan”